

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Pembangunan merupakan proses perubahan yang dilaksanakan hampir semua bangsa-bangsa di dunia, karena pembangunan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari usaha mencapai kemajuan bagi bangsa tersebut. Pembangunan adalah upaya multi dimensional yang meliputi perubahan pada berbagai aspek termasuk didalamnya struktur sosial, sikap masyarakat, serta institusi nasional tanpa mengesampingkan tujuan awal yaitu pertumbuhan ekonomi, penanganan ketimpangan pendapatan serta perluasan kesempatan kerja. Pembangunan ekonomi mutlak diperlukan oleh suatu negara dalam rangka meningkatkan taraf hidup dan kesejahteraan masyarakat, dengan cara mengembangkan semua bidang kegiatan yang ada di suatu negara.¹

Kebanyakan literatur umum ekonomi mengartikan pertumbuhan ekonomi sebagai suatu ukuran kuantitatif yang menggambarkan perkembangan suatu perekonomian dalam suatu tahun tertentu apabila di bandingkan dengan tahun sebelumnya. Pernyataan tersebut selalu dinyatakan dalam bentuk presentase perubahan pendapatan nasional pada suatu tahun tertentu di bandingkan dengan tahun sebelumnya.²

¹ Tri Widodo, *Perencanaan Pembangunan, Aplikasi Komputer, Era Desentralisasi Daerah*, (Yogyakarta : UPP STIM YKPN, 2006), hlm. 4

² Sadono Sukirno, *Ekonomi Pembangunan Proses, Masalah dan Dasar Kebijakan*, Edisi Kedua Cetakan Ke-3, (Jakarta : Kencana, 2010), hlm. 9

Pertumbuhan ekonomi adalah terjadinya penambahan atau perubahan pendapatan nasional (produksi nasional/GDP/GNP) dalam satu tahun tertentu, tanpa memperhatikan pertumbuhan penduduk dan aspek lainnya. Istilah pertumbuhan ekonomi dan pembangunan ekonomi akan sering digunakan dalam uraian di berbagai bab dalam buku tentang ekonomi pembangunan. Pembangunan ekonomi adalah pertumbuhan ekonomi yang dapat menyebabkan perubahan-perubahan, terutama terjadi perubahan menurunnya tingkat pertumbuhan penduduk dan perubahan dari struktur ekonomi, baik peranannya dalam penyediaan lapangan kerja, seperti dikemukakan oleh S. Kuznets, H.B Chenery.³

Dalam pelaksanaan pembangunan, pertumbuhan yang tinggi merupakan sasaran utama bagi negara berkembang. Pertumbuhan ekonomi yang terjadi selama suatu periode tertentu tidak terlepas dari perkembangan masing-masing sektor atau subsektor yang ikut membentuk nilai tambah perekonomian suatu daerah. Pertumbuhan ekonomi yang tinggi masih meninggalkan permasalahan yang harus dihadapi didalam pembangunan suatu daerah

Pembangunan ekonomi daerah adalah suatu proses yang mencakup pembentukan institusi-institusi baru, pembangunan industri-industri alternatif, perbaikan kapasitas kerja yang ada untuk menghasilkan produk dan jasa yang lebih baik, identifikasi pasar-pasar baru, alih ilmu pengetahuan dan pengembangan perusahaan-perusahaan baru. Dimana, kesemuanya ini mempunyai

³ Ahmad Mahyudi, *Ekonomi Pembangunan dan Analisis Data Empiris*, Cetakan Pertama, (Bogor : Ghalia Indonesia, 2004), hlm. 1

tujuan utama yaitu untuk meningkatkan jumlah dan jenis peluang kerja untuk masyarakat daerah.⁴

Republik Indonesia, di singkat RI atau Indonesia adalah negara di Asia Tenggara yang di lintasi garis Khatulistiwa dan berada di antara benua Asia dan Australia serta Samudera Pasifik dan Samudera Hindia. Indonesia adalah negara kepulauan terbesar di dunia yang terdiri dari 13.466 pulau, nama alternatif yang biasa di pakai adalah Nusantara. Dengan populasi lebih dari 237 juta jiwa pada tahun 2010. Indonesia adalah negara yang berpendudukan terbesar keempat di dunia dan negara yang berpenduduk muslim terbesar di dunia, dengan lebih dari 207 juta jiwa, meskipun bukanlah secara resmi negara Islam, bentuk pemerintahan Indonesia adalah Republik, dengan Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah dan Presiden yang di pilih langsung

Indonesia termasuk negara yang memiliki luas terbesar dalam bagian di Asia Tenggara, masih termasuk negara yang masih berkembang di bandingkan dengan negara-negara Asia lainnya untuk menjadi negara maju seperti Jepang, China dan Korea. Pertumbuhan ekonomi Indonesia selama beberapa dekade terakhir mengalami Indonesia berbatasan darat dengan Malaysia di pulau Kalimantan, dengan Papua Nugini di pulau Papua dan dengan Timor Leste di pulau Timor (mantan bagian Provinsi dari Indonesia). Negara tetangga lainnya adalah Singapura, Filipina, Australia dan wilayah persatuan Andaman dan Nikobar di India

⁴ Lincolin Arsyad, *Ekonomi Pembangunan*, (Yogyakarta : STIE YKPN, 2004), hlm. 103

Perekonomian Indonesia mengalami pasang surut sesuai dengan kondisi perekonomian dunia. Pendapatan nasional sebagai tolak ukur pertumbuhan ekonomi memperlihatkan pertumbuhan yang fluktuatif. Kondisi perekonomian Indonesia sebagai negara sedang berkembang belum mencapai kondisi *steady state* dimana suatu perekonomian sudah berada dalam keadaan stabil dan tidak mudah terkena guncangan

Tabel 1.1
Perkembangan Data Pendapatan Nasional dan Pertumbuhan Ekonomi di Indonesia Tahun 2008-2012

Tahun	Pendapatan Nasional	Pertumbuhan Ekonomi
2008	4,421,34	6,0
2009	4,912,62	4,6
2010	5,695,45	6,2
2011	3,144,89	6,5
2012	3,601,04	6,3

Sumber: BPS Indonesia Dalam Angka

Dalam tabel data 1.1 bahwa perkembangan pendapatan nasional dan pertumbuhan ekonomi Indonesia mengalami pasang surut dari tahun 2008 sampai tahun 2012, semua di hitung dari berbagai sektor. Seharusnya peran pemerintah sangat penting untuk pertumbuhan ekonomi di Indonesia sehingga dari pendapatan nasional yang di dapat dari berbagai sektor mengalami kenaikan signifikan setiap tahunnya. Angka pertumbuhan ekonomi dalam data di atas menjelaskan melalui laporan presiden tentang kondisi pendapatan nasional tiap tahunnya

Selama lebih 30 tahun masa kepemimpinannya, Soeharto berhasil membawa Indonesia kedalam pertumbuhan ekonomi rata-rata 7,5 % pertahun. Panjang usia harapan (*life expectancy*) mengikat tajam dari 56 tahun pada tahun 1966 menjadi 71 tahun 1990. Proporsi penduduk yang hidup dalam kemiskinan *absolute* menurun tajam dari 60% pada tahun 1966 menjadi 14% pada tahun 1990. Investasi meningkat tajam, tabungan domestik cukup tinggi dan usaha pertanian tumbuh cepat sehingga mencapai swasembada pada tahun 1984. Inflasi dapat dipertahankan dibawah 10%, rata-rata defisit neraca berjalan mencapai 2,5% dan cadangan devisa dipertahankan mendekati jumlah kebutuhan impor kurang lebih 5 bulan. Selama 7 tahun yaitu antara tahun 1983 – 1990, ekspor non migas telah tumbuh rata-rata diatas 20% pertahun dan ekspor barang-barang manufaktur tumbuh 30% setiap tahunnya. Meskipun pada zaman Soeharto rakyat Indonesia sejahtera tetapi sejak awal repelita 1969-1970, pemerintahan Soeharto gemar menciptakan utang luar negeri, sehingga Indonesia terjerebab kedalam *debt trap*. Utang luar negeri pemerintah yang pada 1969 sebesar US\$ 2,3 miliar atau 27% dari PDB, pada tahun 1998 melambung menjadi 67,3 miliar atau 75,4% dari PDB. Walaupun begitu, utang yang membengkak diimbangi oleh kenaikan PDB perkapita dari US\$ 70 tahun 1966 menjadi US\$ 1.136 1996. Pertumbuhan ekonomi selama 1970 sampai dengan 1997 rata-rata sekitar 7-8 %. Pada masa pemerintahan Soeharto, ada beberapa isu-isu yaitu diantaranya HAM (khususnya persoalan konflik Timor-Timur), demokratisasi dan pemberantasan KKN (korupsi, kolusi dan nepotisme)

Keadaan ekonomi pada zaman B.J Habibie selama kurang lebih 1 tahun yaitu dari tahun 1998-1999. Selama lima bulan pertama masa jabatannya pada tahun 1998, nilai tukar rupiah terhadap dollar AS berfluktuasi. Selama triwulan pertama, nilai tukar rupiah rata-rata mencapai sekitar RP 9200,- dan selanjutnya menurun menjadi sekitar 8000 dalam bulan April hingga pertengahan Mei. Nilai tukar rupiah cenderung di atas RP 10.000,- sejak minggu ketiga bulan Mei kecenderungan meningkatnya nilai tukar rupiah sejak Mei 1998 terkait dengan kondisi sosial politik yang bergejolak. Nilai tukar rupiah menguat hingga RP. 6500 per dollar AS di akhir masa pemerintahannya

Pada waktu B.J Habibie menggantikan Soeharto sebagai Presiden RI pada tanggal 21 Mei 1998 ada lima isu yang harus dihadapinya, yaitu:

1. Masa depan reformasi
2. Masa depan ABRI
3. Masa depan daerah-daerah yang ingin memisahkan diri dari Indonesia
4. Masa depan Soeharto, keluarganya, kekayaannya dan kroni-kroninya
5. Masa depan perekonomian dan kesejahteraan rakyat Indonesia

Pada masa pemerintahan Abdurahman Wahid (Gusdur) dalam hal ekonomi, dibandingkan tahun sebelumnya yaitu tahun 1999 kondisi perekonomian Indonesia mulai menunjukkan adanya perbaikan. Laju pertumbuhan PDB mulai positif walaupun tidak jauh dari 0% dan pada tahun 2000 proses pemulihan perekonomian Indonesia jauh lebih baik lagi dengan laju pertumbuhan hampir mencapai 5%. Selain pertumbuhan PDB, laju inflasi dan tingkat suku bunga (SBI) juga rendah yang mencerminkan bahwa kondisi moneter di dalam negeri sudah

mulai stabil. Indikator-indikator lainnya adalah angka inflasi yang diprediksi dapat menembus dua digit dan cadangan devisa yang pada bulan Maret tahun 2000 menurun dari 29 miliar dollar AS menjadi 28,875 dollar AS. Namun pada masa pemerintahannya, pasca reformasi ketika Gusdur memimpin Indonesia, politik luar negeri, Indonesia cenderung mirip dengan politik luar negeri Indonesia dijalankan oleh Soekarno pada masa orde lama, dimana lebih menekankan pada peningkatan citra Indonesia pada dunia internasional. Pada masa pemerintahannya Gusdur secara konstan mengangkat isu-isu domestik dalam pertemuannya dengan setiap kepala negara yang dikunjunginya. Selain isu Timor-Timur, adalah soal integritas teritorial Indonesia seperti dalam kasus Aceh dan isu perbaikan ekonomi

Masa pemerintahan Megawati Soekarno Putri yang hanya berlangsung selama tiga tahun (2001-2004) berhasil mengurangi ketergantungan, berhasil meningkatkan pertumbuhan industri pengolahan sebesar 6,4 persen. Megawati juga berhasil menurunkan tingkat ketergantungan ekonomi Indonesia dari luar negeri dengan jumlah hutang luar negeri pemerintah sebesar 78,25 miliar USD. Pada tahun 2001 sampai 2004 perhitungan PDB berdasarkan tahun 2000, ekonomi Indonesia tumbuh rata-rata sebesar 4,6 persen. Akhirnya pada masa reformasi yaitu tahun 1999 sampai dengan tahun 2004, pergeseran itu semakin cenderung ke sektor industri pengolahan yaitu 27,8 persen pada tahun 2000 menjadi 28,3 persen pada tahun 2004, sedangkan sektor lainnya semakin mengecil. Sektor pertanian pada tahun 2000 turun menjadi 15,6 persen dan turun lagi menjadi 15,4 persen pada tahun 2004, sektor pertambangan dan penggalian sempat naik di tahun 2000

yaitu menjadi 12,1 persen tetapi turun lagi menjadi 8,6 persen pada tahun 2004, sedangkan sektor lainnya turun menjadi 47,7 persen pada tahun 2004. Namun ekonomi di bawah pemerintahan Megawati tidak mengalami perbaikan yang nyata dibandingkan sebelumnya, meskipun kurs rupiah relatif berhasil dikendalikan oleh Bank Indonesia menjadi relatif stabil, kondisi ekonomi pada umumnya tidak baik, terutama pertumbuhan ekonomi, perkembangan investasi, kondisi fiskal, serta keadaan keuangan dan perbankan. Hubungan sipil militer merupakan salah satu isu utama dalam perjalanan masa pemerintahan Megawati

Anggaran pendapatan dan belanja negara tahun anggaran 2008, telah terjadi berbagai perkembangan dan perubahan keadaan yang sangat mendasar yang berdampak signifikan pada berbagai indikator ekonomi yang berpengaruh pada pokok-pokok kebijakan fiskal dan pelaksanaan anggaran pendapatan dan belanja negara tahun anggaran 2008 sehingga diperlukan adanya perubahan perkiraan atas APBN. Pertumbuhan ekonomi tahun 2008 sebesar 6,1 persen didukung oleh sumber utama pertumbuhan komponen ekspor 4,6 persen, diikuti konsumsi rumah tangga 3,1 persen, pembentukan modal tetap bruto 2,6 persen dan konsumsi pemerintah 0,8 persen. Presiden Susilo Bambang Yudhoyono mengatakan pertumbuhan ekonomi sepanjang 2009 mencapai 4,5 persen pertumbuhan ini dinilai positif karena banyak negara justru mengalami kemunduran, pertumbuhan tersebut terjadi karena banyaknya faktor-faktor pendukung tumbuhnya pertumbuhan salahsatunya inflasi sepanjang 2009 pada kisaran 2,8 persen dalam 30 tahun. Hanya ada 3 tahun termasuk 2009, yang inflasinya di bawah 3 persen. Pertumbuhan ekonomi tahun 2010 tumbuh 6,1 persen adanya banyaknya kendala

dalam berbagai faktor dalam peningkatan perekonomian negara, perlunya optimisme yang didasarkan atas berbagai faktor penopang pertumbuhan ekonomi nasional yang kini mulai bergerak, tingginya konsumsi masyarakat yang selama ini mendominasi dan menjadi faktor penting untuk mendorong pertumbuhan ekonomi nasional dengan dibarengi meningkatnya investasi dan ekspor sementara dari sisi belanja pemerintah, penyerapan anggaran yang terjadi besar-besaran di yakini juga akan mendorong laju pertumbuhan. Pertumbuhan ekonomi Indonesia pada tahun 2011 tercatat sebesar 6,5 persen dengan pembentukan produk domestik regional bruto (PDB) atas dasar harga berlaku mencapai Rp 1.931,3 triliun. Secara kumulatif, PDB Indonesia pada 2011 berdasarkan harga berlaku mencapai Rp 7.427,1 triliun, sedangkan atas dasar harga konstan sebesar Rp 2.463,2 triliun. Pada tahun 2011 lalu terjadi pertumbuhan di semua sektor ekonomi. Pertumbuhan tertinggi, terjadi di sektor pengangkutan dan komunikasi yang tumbuh 10,7 persen, sektor perdagangan, hotel dan restoran tumbuh 9,2 persen, sedangkan sektor keuangan, real estate dan jasa perusahaan tumbuh 6,8 persen. Pertumbuhan ekonomi Indonesia sepanjang 2012 hanya 6,23 persen. Sektor yang mengalami pertumbuhan tertinggi ditopang oleh sektor pengangkutan dan komunikasi 9,98 persen, sektor perdagangan, hotel, dan restoran sebesar 8,11 persen dan sektor konstruksi mencapai 7,5 persen. Sektor lainnya, bidang keuangan, real estate dan jasa perusahaan sebesar 7,5 persen dan di bidang listrik, gas, dan air minum sebesar 6,40 persen.⁵

⁵ Deddy Rustiono, Tesis, *Analisis Pengaruh Investasi, Tenaga Kerja, dan Pengeluaran Pemerintah Terhadap Pertumbuhan Ekonomi di Provinsi Jawa Tengah*, UNDIP Semarang 2008

Berikut ini beberapa isu yang menjadi kontroversi dalam setahun pemerintahan SBY - Boediono:

1. Kasus Century
2. Kasus Kriminalisasi KPK
3. Kasus Mafia Pajak
4. Sekretariat Gabungan
5. Konflik Perbatasan dengan Malaysia
6. Isu Jaksa Agung

Perencanaan memiliki peran yang sangat penting dalam proses pembangunan. Salahsatu peran perencanaan adalah sebagai arahan bagi proses pembangunan untuk berjalan menuju tujuan yang ingin dicapai disamping sebagai tolak ukur keberhasilan proses pembangunan yang dilakukan

Pertumbuhan ekonomi merupakan tingkat pertambahan dari pendapatan nasional. Dengan demikian, pertumbuhan ekonomi merupakan sebagai proses kenaikan output perkapita dalam jangka panjang dan merupakan ukuran keberhasilan pembangunan.⁶

Dalam rangka meningkatkan kesejahteraan masyarakat maka diperlukan pertumbuhan ekonomi yang meningkat dan distribusi pendapatan yang merata. Pembangunan merupakan suatu proses multi dimensional yang melibatkan perubahan-perubahan besar dalam struktural sosial, sikap mental yang sudah

⁶ Mudrajad Kuncoro, *Ekonomi Pembangunan: Teori, Masalah dan Kebijakan*, (Yogyakarta : UPP AMP YKPN, 2000), hlm. 35

terbiasa dan lembaga-lembaga nasional termasuk pula percepatan dan akselerasi pertumbuhan ekonomi, pengurangan ketimpangan dan pemberantasan kemiskinan yang *absolute*.⁷

Pertumbuhan suatu perekonomian juga tidak bisa lepas dari peran pemerintah. pemerintah harus diakui dan dipercaya untuk memikul peranan lebih besar dan lebih menentukan di dalam upaya pengelolaan perekonomian nasional/daerah. Sumber daya manusia maksudnya kualitas input tenaga kerja, atau sumber daya manusia merupakan faktor terpenting bagi keberhasilan ekonomi. Hampir semua faktor produksi yang lainnya, yakni barang modal, bahan mentah serta teknologi, bisa dibeli atau dipinjam dari negara lain. Tetapi penerapan teknik-teknik produktivitas tinggi atas kondisi-kondisi lokal hampir selalu menuntut tersedianya manajemen, keterampilan produksi, dan keahlian yang hanya biasa diperoleh melalui angkatan kerja terampil yang terdidik. Sumber daya alam dengan faktor produksi adalah tanah. Tanah yang dapat ditanami merupakan faktor yang paling berharga. Selain tanah, sumber daya alam yang 9 penting antara lain minyak-minyak gas, hutan air dan bahan-bahan mineral lainnya

Tenaga kerja merupakan suatu faktor yang mempengaruhi output suatu daerah. Angkatan kerja yang besar akan terbentuk dari jumlah penduduk yang besar. Namun pertumbuhan penduduk dikhawatirkan akan menimbulkan efek yang buruk terhadap pertumbuhan ekonomi. Pertumbuhan penduduk yang cepat mendorong timbulnya masalah keterbelakangan dan membuat prospek

⁷ Todaro, *Pembangunan Ekonomi*, (Jakarta : Erlangga, 2006), hlm. 4

pembangunan menjadi semakin jauh. Selanjutnya dikatakan bahwa masalah kependudukan yang timbul bukan karena banyaknya jumlah anggota keluarga, melainkan karena mereka terkonsentrasi pada daerah perkotaan saja sebagai akibat dari cepatnya laju migrasi dari desa ke kota. Namun demikian jumlah penduduk yang cukup dengan tingkat pendidikan yang tinggi dan memiliki skill akan mampu mendorong laju pertumbuhan ekonomi. Dari jumlah penduduk usia produktif yang besar maka akan mampu meningkatkan jumlah angkatan kerja yang tersedia dan pada akhirnya akan mampu meningkatkan produksi output disuatu daerah

Peran pemerintah sangatlah penting untuk memajukan pembangunan dan pertumbuhan di suatu daerah. Pemerintah akan melakukan pengeluaran belanja pembangunan sebagai langkah untuk menjalankan fungsi-fungsinya tersebut. Belanja pembangunan merupakan pengeluaran pemerintah untuk memenuhi kebutuhan pembangunan. Tujuan dari pembangunan yaitu sangat akan mempengaruhi merangsang dari berbagai sektor yang berhubungan dengan pembangunan ekonomi sehingga mampu meningkatkan pendapatan di suatu daerah.⁸

Indonesia dengan jumlah penduduk 237.641.826 jiwa tentu saja hal ini menyebabkan Indonesia memiliki sumber daya manusia atau tenaga kerja yang melimpah, merupakan modal yang sangat besar bagi bangsa Indonesia untuk mengejar ketertinggalan dari negara lain yang lebih maju dan makmur. Hal ini bisa terwujud dengan pengelolaan SDM dan SDA terlaksana dengan baik

⁸ Todaro, *Pembangunan Ekonomi*, Jilid 1, (Jakarta : Erlangga, 2007), hlm. 7

Masalah akan timbul apabila terdapat kesenjangan antara jumlah tenaga kerja yang besar dengan minimnya ketersediaan lapangan kerja yang ada. Dengan kata lain lapangan kerja yang ada tidak mampu menampung (memperkejakan) tenaga kerja yang ada, terlebih meningkatnya tingkat pengangguran sehingga jumlah penduduk miskin juga semakin meningkat dan memiliki efek negatif dari berbagai sektor

Besarnya angkatan kerja yang ada di Indonesia tidak mampu di serap semuanya oleh kesempatan kerja yang ada, karena tidak berimbangnya jumlah angkatan kerja yang ada dengan ketersediaan kesempatan kerja, hal ini merupakan pokok yang menyebabkan terhambatnya penyelenggaraan pembangunan ekonomi

Dengan kualitas tenaga kerja yang rendah ini disebabkan karena tingkat pendidikan penduduk yang rendah pula atau belum memadai dengan jenis pekerjaan yang tersedia. Tidak saja di sebabkan banyaknya usia putus sekolah, namun juga di sebabkan oleh rendahnya mutu pendidikan sehingga tenaga kerja tidak mampu menyerap atau menguasai ilmu pengetahuan dan teknologi

Luasnya wilayah dan banyaknya kepulauan di Indonesia serta terkonsentrasinya penduduk di pulau jawa juga merupakan penyebab timbulnya permasalahan ketenagakerjaan di Indonesia. Kondisi geografis Indonesia ini mengakibatkan persebaran penduduk tidak merata. Daerah-daerah luas di Indonesia kekurangan penduduk sementara di pulau Jawa kelebihan penduduk (padat penduduk). Banyaknya penduduk di pulau Jawa ini dapat meningkatkan investasi. Berbagai usaha di dirikan namun tetap tidak mampu untuk menekan jumlah pengangguran, malah sebaliknya semakin tinggi. Dengan banyak

permasalahan tenaga kerja dari berbagai sektor yang ada di Indonesia membuat peran penting pemerintah untuk menanggulangi permasalahan tenaga kerja di Indonesia

Peran penting pemerintah sangat penting dalam meningkatkan pertumbuhan ekonomi, karena mencakup dalam menyediakan kebutuhan publik dan pelayanan kepada masyarakat yang tidak dapat disediakan oleh pihak swasta. Peran ini tertuang dalam pengeluaran pemerintah yaitu anggaran pendapatan dan belanja negara, selanjutnya di singkat APBN. Belanja pemerintah tersebut merupakan rencana keuangan tahunan pemerintah yang di setujui oleh Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) sesuai dengan terwujudnya perekonomian nasional yang berkelanjutan. Termasuk peran pemerintah dalam meningkatkan sumber daya manusia (SDM) melalui kualitas pendidikan, kesehatan, dan perluasan kesempatan usaha atau lapangan pekerjaan. Anggaran ini merupakan modal pembangunan infrastruktur dan fasilitas penunjang kegiatan perekonomian bagi masyarakat seperti jalan raya, jembatan, rumah sakit, gedung sekolah, pasar, bantuan langsung pada masyarakat ataupun subsidi pendapatan

Anggaran belanja pemerintah adalah kewajiban pemerintah pusat yang di akui sebagai pengurang nilai kekayaan bersih yang terdiri atas belanja pemerintah pusat dan transfer ke daerah. Belanja pemerintah pusat menurut jenis di rinci dalam bentuk belanja modal, belanja barang, pembayaran cicilan dan bunga utang, dan subsidi. Transfer ke daerah adalah bagian dari belanja pemerintah dalam rangka mendanai pelaksanaan desentralisasi fiskal berupa dana perimbangan, dana otonomi khusus dan dana penyesuaian

Secara keseluruhan iklim Indonesia sangat atraktif untuk akses investasi internasional. Tersedianya insentif fiskal untuk menarik investor asing, tidak memberlakukan batasan jumlah investasi di hampir semua sektor dengan mempersingkat proses permohonan adalah beberapa keuntungan investor asing untuk berinvestasi di Indonesia. Sebagai anggota dari ASEAN, Indonesia terletak di tengah jalur perdagangan dua benua utama yaitu Asia dan Australia dan diapit oleh dua Samudera yaitu Samudera Hindia dan Pasifik. Dan faktor keuntungan lain, sebagai berikut:

- Negara yang memiliki kandungan kekayaan alam yang luar biasa seperti pertanian, perkebunan, perikanan, pertambangan, minyak dan gas
- Populasi penduduk sejumlah 237 juta dan sangat dinamis merupakan pasar yang potensial dan merupakan sumber tenaga kerja
- Lokasi strategis sebagai jalur komunikasi perairan internasional
- Negara yang lebih demokratis

Pemerintah Indonesia menyadari bahwa investasi adalah faktor penting untuk perkembangan ekonomi. Oleh sebab itu pemerintah berusaha memperbaiki prosedur investasi di masa datang agar menstimulasi situasi investasi yang lebih baik

Indonesia dalam membangkitkan lagi peluang bisnis sangatlah berat oleh karena adanya beberapa faktor yang berpengaruh. Faktor pertama adalah kondisi sosial dan keamanan yang belum kondusif. Walaupun gangguan keamanan ataupun gangguan sosial itu terjadi di beberapa daerah tertentu di Indonesia, namun masyarakat investor khususnya investor asing menganggap kondisi

tersebut berlaku di seluruh wilayah Indonesia. Faktor kedua belum tegaknya “*law and order*” di Indonesia yang di rasakan sangat mengganggu iklim penanaman modal itu sendiri

Tabel 1.2
Data Jumlah Penduduk Yang Bekerja (Juta Jiwa) Tahun 2009-2012

Tahun	Tenaga Kerja
2009	104,87
2010	108,21
2011	109,67
2012	110,81

Sumber: BPS Indonesia Dalam Angka

Dalam tabel 1.2 diatas menjelaskan tentang angka penduduk yang statusnya sudah bekerja di Indonesia dalam tahun 2012 terakhir. Dalam data mempunyai kenaikan tenaga kerja yang berbeda-beda yang menyebabkan kenaikan angka angkatan kerja. Angka tersebut berpacu dari berbagai kenaikan jumlah penduduk yang terus bertambah di setiap tahunnya, perlu adanya campur tangan peran pemerintah untuk menangani kenaikan angkatan kerja dengan menyediakan lapangan kerja untuk meminimalisir kenaikan jumlah pengangguran jika angkatan kerja tidak di imbangi dengan menyediakan lapangan kerja

Tabel 1.3
Data Realisasi Pengeluaran Negara (Milyar Rupiah) Tahun 2009-2012

Tahun	Pengeluaran Pemerintah
2009	8.469.923.612
2010	10.382.743.355
2011	12.995.190.241
2012	11.321.586.849

Sumber: BPS Indonesia Dalam Angka

Dalam tabel 1.3 diatas menjelaskan tentang nilai rata-rata pengeluaran pemerintah di Indonesia dari tahun 2009-2012 terjadinya peningkatan tiap tahunnya. Pentingnya peran pemerintah untuk melakukan permasalahan yang terjadi di Indonesia, karena besar kecilnya pengeluaran yang dikeluarkan pemerintah berpengaruh besar pada kondisi perekonomian di Indonesia

Tabel 1.4
Perkembangan Realisasi PMDN di Indonesia Tahun 2009-2012

Tahun	PMDN (Milyar Rupiah)
2009	37.799
2010	60.626
2011	76.700
2012	92.182

Sumber: BPS Indonesia Dalam Angka

Dalam tabel 1.4 diatas menjelaskan tentang perkembangan penanaman modal dalam negeri (PMDN) yang ada di Indonesia pada tahun 2009-2012.

Dilihat dari perkembangannya, Indonesia termasuk negara memiliki sumber daya alam yang melimpah mampu mengundang para investor asing maupun dalam negeri untuk berinvestasi. Banyak sumber daya yang di peroleh dari berbagai sektor mampu membantu sebagai pendapatan negara untuk meningkatkan pembangunan ekonomi yang di Indonesia. pada tabel tersebut dapat di lihat perkembangan dalam rata-rata yang di peroleh PMDN yang ada di Indonesia memiliki perkembangan yang signifikan dari tiap tahunnya

Salahsatu realitas pembangunan adalah terciptanya kesenjangan pembangunan yaitu terjadinya perbedaaan laju pertumbuhan antar daerah dan antar kawasan yang menyebabkan terjadinya kesenjangan kemakmuran dan kemajuan antar daerah. Pertumbuhan ekonomi yang cepat akan menimbulkan ketimpangan distribusi pendapatan hal ini dikarenakan tidak memperhatikan apakah pertumbuhan tersebut lebih besar atau lebih kecil dari tingkat pertumbuhan penduduk atau perubahan struktur ekonomi.⁹

Dalam kemajuan pembangunan antar daerah bisa dilihat yang terjadi perbedaan laju pertumbuhan ekonomi di Indonesia dengan wilayah lainnya, adanya bagian sektor yang terjadi karena kurangnya mengalami kemajuan. Bisa di lihat perbedaan tenaga kerja, pengeluaran pemerintah dan PMDN terhadap pertumbuhan ekonomi yang terjadi antar negara Indonesia dan China:

⁹ Mudjarad Kuncoro, *Otonomi dan Pembangunan Daerah : Reformasi, Perencanaan, Strategi dan Peluang*, (Jakarta : Erlangga, 2003), hlm. 4

Tabel 1.5
Perkembangan Data Perbandingan Negara Indonesia dan China Tahun
2006-2011

Indonesia		China	
Tahun	GDP	Tahun	GDP
2006	5,50	2006	12,70
2007	6,35	2007	14,20
2008	6,01	2008	9,60
2009	4,63	2009	9,20
2010	6,20	2010	10,40
2011	6,46	2011	9,10

Sumber: www.World Bank

Dalam data tabel 1.5 diatas menyimpulkan bahwa terjadi kesenjangan antar kedua negara di Indonesia dan China, kesenjangan terjadi dalam kurun waktu enam tahun dari tahun 2006 sampai 2011 data GDP setiap tahunnya secara jelas angka di negara China lebih besar di bandingkan negara Indonesia

Tingginya tingkat pertumbuhan ekonomi yang ditunjukkan dengan tingginya nilai PDB menunjukkan bahwa negara tersebut mengalami kemajuan dalam perekonomian. Salahsatu indikator keberhasilan pelaksanaan pembangunan yang dapat dijadikan tolak ukur secara makro adalah pertumbuhan ekonomi. Pertumbuhan ekonomi nasional dapat dicerminkan perubahan PDB dalam suatu wilayah

Pertumbuhan ekonomi secara sempit dapat diartikan dengan meningkatnya produksi total suatu daerah. Selain itu pertumbuhan ekonomi dapat diartikan sebagai peningkatan pendapatan perkapita serta meningkatnya kesejahteraan

masyarakat. Pertumbuhan ekonomi tidak akan pernah lepas dari peranan para pelaku ekonomi yakni pemerintahan yang dapat berperan sebagai instrumen kebijakan publik dan fiskal, swasta, yang berperan dalam pengembangan investasi dan masyarakat itu sendiri yang berperan sebagai input dari faktor produksi dan masyarakat itu sendiri yang berperan sebagai input dari faktor produksi dan jaminan terciptanya pasar dalam perekonomian

Masalah akan timbul apabila terdapat kesenjangan antara jumlah tenaga kerja yang besar dengan minimnya ketersediaan lapangan kerja yang ada. Dengan kata lain lapangan kerja yang ada tidak mampu menampung (memperkejakan) tenaga kerja yang ada, terlebih meningkatnya tingkat pengangguran sehingga jumlah penduduk miskin juga semakin meningkat dan memiliki efek negatif dari berbagai sektor

Besarnya angkatan kerja yang ada di Indonesia tidak mampu di serap semuanya oleh kesempatan kerja yang ada, karena tidak berimbangnya jumlah angkatan kerja yang ada dengan ketersediaan kesempatan kerja, hal ini merupakan pokok yang menyebabkan terhambatnya penyelenggaraan pembangunan ekonomi

Dengan kualitas tenaga kerja yang rendah ini disebabkan karena tingkat pendidikan penduduk yang rendah pula atau belum memadai dengan jenis pekerjaan yang tersedia. Tidak saja di sebabkan banyaknya usia putus sekolah, namun juga di sebabkan oleh rendahnya mutu pendidikan sehingga tenaga kerja tidak mampu menyerap atau menguasai ilmu pengetahuan dan teknologi.¹⁰

¹⁰ Siswanto Sastrohadiwiryo, *Manajemen Tenaga Kerja Indonesia*, (Jakarta : Bumi Aksara, 2005), hlm. 130

Maka dari itu dengan adanya sistem pemerintah dan kemajuan perekonomian dari berbagai sektor yang baik menjadikan negara tersebut menjadi pertumbuhan ekonomi yang baik. Berdasarkan uraian diatas, maka peneliti tertarik untuk meneliti tesis ini dengan judul: **ANALISIS DETERMINAN TENAGA KERJA, PENGELUARAN PEMERINTAH DAN PENANAMAN MODAL DALAM NEGERI (PMDN) TERHADAP PERTUMBUHAN EKONOMI DI INDONESIA TAHUN 1984-2012**

B. Rumusan Masalah

Kebijakan pemerintah sebagai perangkat kebijakan ekonomi makro untuk mencapai sasaran pembangunan yaitu meningkatkan laju pertumbuhan ekonomi. APBN sebagai instrumen kebijakan fiskal di upayakan mampu berfungsi secara optimal untuk meredam siklus bisnis atau fluktuasi perekonomian. Penanaman modal sebagai salah satu bagian dari pendapatan yang mampu menyeimbangi dari berbagai sektor lainnya. Sebagaimana tenaga kerja, pengeluaran pemerintah dan penanaman modal dalam negeri (PMDN) di butuhkan untuk meningkatkan pertumbuhan ekonomi. Dalam permasalahan penelitian ini ingin mengetahui sebagai berikut:

1. Bagaimana tingkat determinasi tenaga kerja, pengeluaran pemerintah dan penanaman modal dalam negeri (PMDN) secara bersama-sama terhadap pertumbuhan ekonomi di Indonesia tahun 1984-2012?
2. Bagaimana tingkat determinasi tenaga kerja, pengeluaran pemerintah dan penanaman modal dalam negeri (PMDN) di pandang dari sudut Islam secara bersama-sama terhadap pertumbuhan ekonomi?

C. Tujuan Penelitian

Berdasarkan identifikasi masalah diatas, maka tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui:

1. Tingkat determinasi tenaga kerja secara parsial terhadap pertumbuhan ekonomi di Indonesia tahun 1984-2012
2. Tingkat determinasi pengeluaran pemerintah secara parsial terhadap pertumbuhan ekonomi di Indonesia tahun 1984-2012
3. Tingkat determinasi penanaman modal dalam negeri (PMDN) secara parsial terhadap pertumbuhan ekonomi di Indonesia tahun 1984-2012
4. Tingkat determinasi tenaga kerja, pengeluaran pemerintah dan penanaman modal dalam negeri (PMDN) di pandang dari sudut Islam secara bersama-sama terhadap pertumbuhan ekonomi

D. Manfaat Penelitian

Manfaat penelitian ini ialah untuk khasanah ilmu pengetahuan, penyelesaian masalah secara operasional dan kebijakan. Dengan demikian, manfaat tersebut mencakup:

1. Aspek Teoritis

- a. Sebagai informasi ilmiah dan wawasan ilmu pengetahuan tentang analisis determinan tenaga kerja, pengeluaran pemerintah dan penanaman modal dalam negeri (PMDN) terhadap pertumbuhan ekonomi di Indonesia tahun 1984-2012
- b. Sebagai manfaat khusus bagi ekonomi dengan mengungkap secara empiris faktor-faktor yang mempengaruhinya

- c. Sebagai referensi bagi peneliti lainnya yang berminat untuk mengkaji bidang yang sama dengan pendekatan dan ruang lingkup yang berbeda

2. Aspek Praktis

- a. Sebagai bahan pertimbangan bagi para pengambil kebijakan di jajaran pemerintah Indonesia dalam menetapkan kebijakan pembangunan ekonomi nasional
- b. Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan sumbangan yang bermanfaat bagi ekonomi khususnya bagi para pembaca yang tertarik untuk meneliti hal yang sama

E. Kerangka Pemikiran

Penelitian ini didasari oleh teori yang dikembangkan oleh Solow-Swan yang memusatkan perhatiannya pada bagaimana pertumbuhan penduduk akumulasi kapital, kemajuan teknologi dan output saling berinteraksi dalam proses pertumbuhan ekonomi

Pengeluaran pemerintah didasari oleh teori Rostow dan Musgrave. Dalam teori ini menghubungkan antara pengeluaran yang dilakukan oleh pemerintah dengan tahap-tahap dalam pembangunan ekonomi yakni tahap awal, tahap-tahap menengah dan tahap lanjut

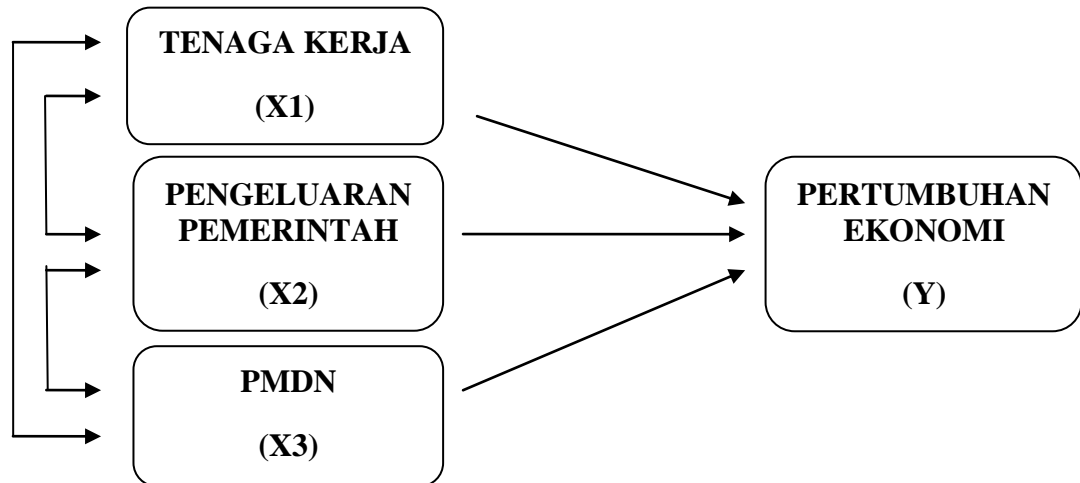
Tenaga kerja didasari oleh teori Irawan dan Suparmoko yang dimaksud dengan angkatan kerja adalah penduduk yang bekerja dan penduduk yang belum bekerja, namun siap untuk bekerja atau sedang mencari pekerjaan pada tingkat upah yang berlaku. Kemudian penduduk yang bekerja adalah mereka yang

melakukan pekerjaan guna menghasilkan barang dan jasa untuk memperoleh penghasilan, baik yang bekerja penuh maupun yang tidak bekerja penuh

Penanaman modal dalam negeri (PMDN) didasari oleh teori Sadono Sukirno dan Mudrajad Kuncoro, yaitu investasi swasta atau penanaman modal dalam negeri (PMDN) bruto merupakan komponen dari perbelanjaan agregat yang sifatnya tidak stabil dan menjadi salahsatu sumber penting dari konjungtur dalam perekonomian

Dalam penelitian ini pertumbuhan ekonomi di Indonesia sebagai (Y), pertumbuhan ekonomi dilihat melalui : pengeluaran pemerintah (X1), tenaga kerja dilihat dengan jumlah orang yang bekerja (X2), penanaman modal dalam negeri (X3)

Dalam rangka meningkatkan pertumbuhan ekonomi di Indonesia diperlukan faktor-faktor yang dapat mempengaruhi pertumbuhan ekonomi wilayah antara lain faktor tenaga kerja. Pertumbuhan tenaga kerja dianggap sebagai salahsatu faktor positif yang memacu pertumbuhan ekonomi, jadi dengan meningkatnya tenaga kerja akan mendorong terjadinya produktivitas dan akan memacu pertumbuhan ekonomi. Adanya penanaman modal dalam negeri (PMDN) sebagai perolehan pendapatan Indonesia dan memajukan pembangunan ekonomi. Investor sebagai pelaku membuat adanya investasi dengan memanfaatkan sumber daya alam (SDA) dan sumber daya manusia (SDM) yang di manfaatkan Indonesia dalam bentuk penanaman modal dalam negeri (PMDN)

Gambar 1.1**Kerangka Pemikiran****F. Sistematika Penulisan****BAB 1 PENDAHULUAN**

Dalam bab ini berisi latar belakang, rumusan masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian, kerangka pemikiran dan sistematika penulisan

BAB II LANDASAN TEORI

Dalam bab ini menjelaskan pengertian pembangunan ekonomi, pengertian pertumbuhan ekonomi, teori pertumbuhan ekonomi, tenaga kerja, pengeluaran pemerintah, penanaman modal dalam negeri (PMDN), hubungan antara tenaga kerja terhadap pertumbuhan ekonomi, hubungan antara pengeluaran pemerintah terhadap pertumbuhan ekonomi, hubungan antara penanaman modal dalam negeri (PMDN) terhadap pertumbuhan ekonomi, penelitian terdahulu

BAB III METODELOGI PENELITIAN

Dalam bab ini menjelaskan objek penelitian, jenis dan sumber data, metode pengumpulan data, operasional variabel, model penelitian, uji asumsi klasik, rancangan pengujian hipotesis

BAB IV HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

Dalam bab ini berisi tentang gambaran objek penelitian, perkembangan objek penelitian, hasil analisis penelitian, uji asumsi klasik, pengujian hipotesis, analisis hasil dari pembahasan

BAB V KESIMPULAN DAN SARAN

Dalam bab ini berisi kesimpulan dan saran

